

**MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF BENIH PADI
UNGGUL LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN BENIH DI
PROVINSI SUMATRA BARAT**

Disertasi

MASRURI

2131622003



**PROGRAM DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2025**

MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF BENIH PADI UNGGUL LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN BENIH DI PROVINSI SUMATRA BARAT

Oleh: Masruri (2131622003)

(Dibawah bimbingan: Prof. Dr. Ir. Rika Ampuh Hadiguna, MT, IPU, ASEAN
Eng, Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS, dan Prof. Henmaidi, ST M.Eng.Sc, Ph.D)

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi tata kelola benih padi varietas unggul lokal di Sumatra Barat dan rumusan model tata kelola kolaboratif antar *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola benih padi varietas unggul lokal di Sumatra Barat sebagai peta jalan menuju kemandirian benih. Tujuan penelitian ini adalah memetakan peran *stakeholder* yang terlibat, serta level kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola benih padi varietas unggul lokal di Sumatra Barat dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola kolaboratif benih padi varietas unggul lokal di Sumatra Barat saat ini. Merumuskan model tata kelola benih kolaboratif yang memperkuat posisi strategis *stakeholder* lokal dalam tata kelola benih padi varietas unggul lokal menuju kemandirian benih di Sumatra Barat merupakan tujuan ketiga penelitian ini. Rancangan penelitian adalah *mix methode reseach* yang menggunakan model *The sequential exploratory design*. Model ini berguna ketika peneliti ingin membangun model teoritis atau pemahaman awal tentang fenomena kompleks, kemudian menguji temuan tersebut secara kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara semi terstruktur dengan 40 (empat puluh) informan serta wawancara terstruktur dengan 5 (lima) orang *expert*. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis peran dan analisis pengaruh dan kepentingan dan dilengkapi dengan analisis kuantitatif melalui metode *Fuzzy Delphi*. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah melalui BPSB dan Dinas Pertanian Provinsi sebagai *key stakeholder* terlibat dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat di level kebijakan. Kelompok tani/petani penangkar sebagai *subject* di level operasional berada pada posisi yang lemah. Faktor faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat terdiri faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Faktor ekonomi yaitu stok benih, pemasaran benih dan faktor sosial yaitu sumber daya dan kapasitas *stakeholder* memiliki pengaruh besar dan menjadi prioritas jangka pendek dalam meningkatkan level kolaborasi tata kelola benih padi unggul lokal di Provinsi Sumatra Barat sehingga menjadi level “kolaborasi”. Level kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat berdasarkan penilaian indikator yang didapatkan berada pada level “kerjasama/cooperation. Berdasarkan temuan di atas dirumuskan model tata kelola kolaboratif benih padi unggul lokal sebagai kebaruan konsep di tataran kebijakan dan implementasinya yang dapat menjadi dasar untuk mencapai kemandirian pangan dan benih di Sumatra Barat.

Kata Kunci: kolaborasi, SDGs 2, tata kelola benih kolaboratif, analisis *stakeholder*, padi unggul lokal.

COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL FOR LOCAL SUPERIOR RICE SEED SYSTEMS IN WEST SUMATRA: TOWARD SEED SELF-SUFFICIENCY

By

Masruri (2131622003)

(Supervisor: Prof. Dr. Ir. Rika Ampuh Hadiguna, MT, IPU, ASEAN Eng., Prof.
Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS., Prof. Henmaidi, ST, M.Eng.Sc, Ph.D.)

ABSTRACT

This dissertation examines the complex dynamics of local superior rice seed governance in West Sumatra, Indonesia, with particular focus on developing a collaborative governance model among *stakeholders* to achieve seed self-sufficiency. Employing a sequential exploratory mixed-methods design, the study combines qualitative and quantitative approaches to provide comprehensive empirical evidence and theoretical insights. The research addresses three main objectives: (1) mapping *stakeholder* roles and existing collaboration levels in local superior rice seed governance, (2) analyzing critical factors influencing *stakeholder* collaboration, and (3) formulating an innovative collaborative governance model that strengthens local *stakeholders'* strategic position. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with 40 key informants representing various *stakeholder* groups, complemented by structured interviews with five domain experts. Qualitative data analysis employed thematic analysis, *stakeholder* role mapping, and influence-importance analysis, while quantitative validation was conducted using *Fuzzy Delphi* method. Key findings reveal: First, the governance system exhibits structural imbalance, with government institutions (BPSB and Provincial Agriculture Office) dominating policy-making while farmer/breeder groups remain operationally marginalized. Second, economic factors (seed stock availability and market mechanisms) and social factors (*stakeholder* capacity disparities) emerge as primary determinants of collaboration quality. Third, current inter-*stakeholder* engagement operates at the cooperation level (transactional interactions), falling short of meaningful collaboration (shared vision and joint decision-making). The study's primary theoretical contribution lies in its novel Collaborative Seed Governance Framework, which reconceptualizes power dynamics in agricultural innovation systems. Practically, the model provides actionable policy recommendations for transitioning from fragmented cooperation to integrated collaboration, emphasizing short-term interventions in seed distribution networks and capacity-building initiatives. These findings advance scholarly understanding of participatory governance in agricultural systems and offer empirically-grounded solutions for achieving seed sovereignty in developing regions. The dissertation concludes with implications for policy, practice, and future research directions in agricultural governance and rural development.

Keywords: collaboration, SDGs 2, collaborative seed governance, stakeholder analysis, local rice varieties.